

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kudus dalam Angka 2022, (Kudus: BPS,2020).
- Bambang Karsono dkk, Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi, (Jakarta : Ubhara Jaya Press, 2021).
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991).
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Group,2016).
- Jum Anggriani, Pelasanaan Pengawasan Pusat Terhadap Peraturan Daerah, (Jakarta : Penerbit Universitas Tama Jagakarsa, 2011).
- Makmur, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, (Bandung, PT. Rafika Aditama,2011).
- Khairul Ikhwan Damanik. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2011).
- Muntoha, Otonomi Daerah Dan Perkembangan “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”, (Yogyakarta : Safiria Insania Press,2010).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019).
- Radjab Semendawai, Dadang Solihin, Optmalisasi Otonomi Daerah Kebijakan, Strategi dan Upaya, (Jakarta : Yayasan Empat Sembilan Indonesia,2013).
- Rahmawati Sururama dkk, Pengawasan Pemerintahan, (Jatinagor : CV Cendeia Press, 2020).
- Ronny Hanitijo S, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Sri Kusriyah, Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Semarang: Unissula Press, 2019).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukun Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum – Filsafat, Teori, dan Praktik, (Depok : PT. Raja Grafindo, 2020).
- Tioner Purba dkk., Pupuk dan Teknologi Pemupukan, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021).

Jurnal

- Berlian Fajar Latifa Noor, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kudus, *Diponegoro Law Review* Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 3.
- Mohammad Danial, Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa, *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol. 2, No. 3, Juli 2014, hlm 272.
- Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2 Desember, 2017, hlm. 151.
- Valeriana Darwis dan Supriyati, Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya, Vol. 11, No. 1, Juni 2014, hlm. 46.
- Vivi Vidyanita dkk., Kinerja Birokrasi Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Jombang, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Vol. 5, No. 1, (2016), hlm. 74.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sarana Budi Daya Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 521.34/019/I/2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus.

Keputusan Bupati Kudus Nomor 580/1/78/2018 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kudus.

Keputusan Bupati Kudus Nomor 521.3.3/21/2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

Wawancara

Abdullah Muttaqin, S.P., Wawancara, Subkoordinator Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus.

Ratih Rustiyorini, S.P., Wawancara, Subkoordinator Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus.

Sumber Lain :

Abdul Aziz, 2016. “Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk Secara Langsung, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2016/09/27/112742261370982-analisis-kebijakan-subsidi-pupuk-secara-langsung>

Anang Panca, “Info Terbaru Harga Pupuk (Subsidi, Non-Subsidi, Organik) – Daftar Harga & Tarif 2022” Diakses dari [Info Terbaru Harga Pupuk \(Subsidi, Non-Subsidi, Organik\) – Daftar Harga & Tarif 2023](#)

Sinonim kata penyediaan, Diakses dari <https://artikatakbbi.com/sinonim-pengadaan>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Somasi Nomor 201/MTJ/LEG/X/2022

**PT MEROKE TETAP JAYA**
Pupuk dan Obat-obatan Pertanian

Nomor : 201/MTJ/LEG/X/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : SOMASI

Medan, 06 Oktober 2022

Kepada Yth.
KIOS FAIZ TANI
di
Desa Kutuk RT.05 RW.03-Undaan-Kudus
Jawa Tengah

Dengan hormat,

Berdasarkan pemantauan kami di lapangan, bahwa kami mendapati KIOS FAIZ TANI menjual pupuk merek SS(AMMOPHOS) yang terdaftar atas nama PT. Meroke Tetap Jaya yang isinya telah dipalsukan.



Bahwa Pihak kami telah membeli 3 (satu) sak pupuk palsu tersebut di KIOS FAIZ TANI pada tanggal 01 Oktober 2022. Setelah mengamati kemasan pupuk tersebut dan melihat isi dalam kemasan tersebut, maka kami yakin bahwa kemasan yang digunakan tersebut merupakan **kemasan bekas milik PT. Meroke Tetap Jaya yang isinya telah dipalsukan**. Hal ini merupakan **TINDAK PIDANA Sistim Budidaya Tanaman dan atau TINDAK PIDANA Perlindungan Konsumen**.

Bersama surat ini kami memberikan **SOMASI** kepada KIOS FAIZ TANI untuk segera menarik seluruh pupuk palsu tersebut dari peredaran termasuk dari KIOS FAIZ TANI maupun kios/toko yang telah membeli pupuk palsu tersebut dari KIOS FAIZ TANI. Apabila pada tanggal 15 Oktober 2022 kami masih mendapati pupuk palsu tersebut di peredaran, maka kami akan melaporkan tindak pidanan ini kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat ditindak tegas.

Demikian SOMASI ini kami berikan untuk dapat ditindaklanjuti segera.

Hormat kami,
PT.Meroke Tetap Jaya



PT MEROKE TETAP JAYA
INDONESIA

Alianto Widjaja
Direktur

Tembusan Yth. :
1. Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

MegaGlodok Kemayoran, Kanto Blok B7 - B8
Jl. Angkasa Kav B6, Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta 10610 - Indonesia

Tel : (+62-21) 658-67845/46, 658-66378
Fax : (+62-21) 657-01562
Website : www.meroketetapjaya.com

REDMI NOTE 9